

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sub sektor Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait perkebunan. Pembangunan perkebunan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional, antara lain dalam pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Oleh karenanya pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting subsektor perkebunan sebagai penyedia devisa, penyedia lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir perkebunan di dalam negeri, mendukung pengembangan wilayah serta peran pentingnya dalam mendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat.

Dalam rangka mewujudkan Visi Rakyat Lampung Berjaya, yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang dijabarkan dalam 6 (enam) Misi, dimana bidang perkebunan masuk pada misi kelima yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung yang memiliki tugas dan fungsi memiliki kewajiban dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan setiap tahun

anggaran. Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2022 Ditjen Perkebunan (05) Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dalam urusan Pertanian bidang Perkebunan. Dinas perkebunan provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Provinsi di bidang perkebunan. Dinas perkebunan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan peraturan, perencanaan dan penetapan standar operasional bidang prasarana dan sarana perkebunan;
- b. Penataan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- d. Pengawasan sarana perkebunan;
- e. Pembinaan produksi di bidang perkebunan;
- f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- g. Pembinaan pengolahan, pemasaran hasil serta promosi hasil perkebunan;
- h. Pemberian ijin usaha/ rekomendasi teknis dalam bidang perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi program pembangunan bidang perkebunan;

- j. Pelaksanaan administrasi dinas dan tata laksana perkebunan;
- k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas, fungsi dan kewenangan

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, terdiri dari:

- 1. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
- 2. Bidang Produksi;
 - a. Seksi Tanaman Tahunan
 - b. Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar
 - c. Seksi Tanaman Semusim dan Tanaman Perkebunan Lainnya
- 3. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan;
 - a. Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pembinaan Usaha
 - b. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
- 4. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - a. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Perkebunan
 - b. Seksi Perbenihan
 - c. Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
- 5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
 - a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
 - b. Seksi Standarisasi dan Mutu Hasil
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
- b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih
- c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk

7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Lampiran.

b. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut :

JML PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNG.
PNS : 139 Org	S3 : - org	IV/d : 1 Org	Es.II-a : 1 org	POPT 6 org
PTHL : 15 org	S2 : 25 org	IV/c : 0 Org	Es.III-a : org	PBT 6 Org
	S1 : 41 org	IV/b : 7 Org	Es.III.b : org	PMHP 2 org
	D4 : 4 org	IV/a : 13 Org	Es.IV-a : org	
	D3 : 8 org	III/d : 22 Org	Pelaksana : org	
	D2 : 0 org	III/c : 25 Org		
	D1 : 0 org	III/b : 38 Org		
	SLTA : 59 org	III/a : 15 Org		
	SLTP : 2 org	II/d : 7 Org		
	SD : 0 org	II/c : 7 Org		
		II/b : 0 Org		
		II/a : 2 Org		
		I/d : 0 Org		
		I/c : 2 Org		
		I/b : 0 Org		
		I/a : 0 Org		

c. Anggaran

Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersumber dari dana APBD dan APBN Tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

**Alokasi Anggaran APBD & APBN untuk Mencapai
Sasaran Strategis Tahun 2022**

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.015.756.493	APBD
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	350.000.000	APBD
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.568.000.000	APBD
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	250.000.000	APBD
Program Perizinan Usaha Pertanian	250.000.000	APBD
Program Penyuluhan Pertanian	4.309.710.250	APBD
Jumlah APBD	29.743.466.743	APBD
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Dekonsentrasi Ditjenbun)	248.100.000	APBN
Program Dukungan Manajemen (Dekonsentrasi Ditjenbun)	835.298.000	APBN
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Tugas Pembantuan Ditjenbun)	5.591.908.000	APBN
Program Dukungan Manajemen (Tugas Pembantuan Ditjenbun)	920.736.000	APBN
Jumlah APBN	7.596.042.000	APBN

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis

Pada periode Renstra Tahun 2019-2024 tidak ada lagi visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi mengikuti visi Gubernur Provinsi Lampung yaitu **“Rakyat Lampung Berjaya”**.

Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

➤ **Kehidupan masyarakat yang aman**

Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

➤ **Kehidupan masyarakat yang berbudaya**

Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

➤ **Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing**

Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

➤ **Kehidupan yang sejahtera**

Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Pada periode Renstra 2019 – 2024 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 6 (enam) misi yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sektor Perkebunan Provinsi Lampung masuk ke dalam misi ke 5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Provinsi Lampung yaitu:

Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka usaha mewujudkan Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, maka dapat dijabarkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.

Misi 5 RPJMD dengan Sasaran 2 yaitu Peningkatan Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung, maka Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menetapkan Tujuan dalam periode 2019-2024 adalah “Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan” dengan Sasaran Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan.

INDIKATOR TUJUAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	% KENAIKAN TAHUN 2022
1.	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	0,4

B. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut misi kelima yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan (ton)	834.990
	a. Lada	15.464
	b. Kopi Robusta	117.780
	c. Tebu	189.606
	d. Karet	164.706
	e. Kakao	61.250
	f. Kelapa Sawit	199.959
	g. Kelapa Dalam	86.225

2.2 Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Kinerja Tahun 2021	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (ton)	822.650	810.493	98,52
		a. Lada	15.235	15.412	101,16
		b. Kopi Robusta	116.039	117.311	101,10
		c. Tebu	186.804	148.549	79,52
		d. Karet	162.272	192.601	118,69
		e. Kakao	60.345	57.507	95,30
		f. Kelapa Sawit	197.004	197.639	100,32
		g. Kelapa Dalam	84.951	81.475	95,91

Evaluasi capaian tahun 2021 untuk produksi tanaman perkebunan dari target kinerja sebesar 822.650 ton teralisasi sebesar 810.493 (98,52%). Dari tujuh komoditas utama

perkebunan terdapat 3 komoditas yang tidak mencapai 100% yaitu komoditas tebu dari target 186.804 ton terealisasi sebesar 148.549 ton (79,52%), kakao dari target 60.345 ton terealisasi 57.507 (95,30%) dan kelapa dalam yang memiliki target kinerja 84,951 dan terealisasi 81,475 (95,91%). Sedangkan untuk komoditas lada, kopi robusta, karet, dan kelapa sawit dengan persentase capaian untuk lada 101,16%, kopi robusta 101,10%, karet 118,69% dan kelapa sawit 100,32%.

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung memiliki Rencana Kinerja Tahun 2022 yang di dalamnya memuat indikator kinerja utama sebagai berikut :

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan (ton)	834.990	Ton
	a. Lada	15.464	Ton
	b. Kopi Robusta	117.780	Ton
	c. Tebu	189.606	Ton
	d. Karet	164.706	Ton
	e. Kakao	61.250	Ton
	f. Kelapa Sawit	199.959	Ton
	g. Kelapa Dalam	86.225	Ton

Adapun Program dan kegiatan untuk mendukung masing-masing sasaran atau aktivitas yang dilakukan sebagai gambaran dalam melaksanakan kebijakan dan program yang telah dituangkan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi terwujudnya visi dan misi yang ditetapkan. Untuk melaksanakan kebijakan dan

program Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung ditetapkan program dan kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

A. Program Kegiatan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 18.015.756.493,- terdiri atas kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 229.274.999,92,-
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 14.631.396.988,08,-
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 109.237.000,-
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 863.453.000,-
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1.489.052.505,-
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 693.342.000,-
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp. 350.000.000,-
 - a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Rp. 75.000.000,-
 - b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Rp. 275.000.000,-
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp. 6.568.000.000,-
 - Penataan Prasarana Pertanian Rp. 6.568.000.000,-
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp. 250.000.000,-

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
Rp. 250.000.000,-
- 5) Program Perizinan Usaha Pertanian Rp. 250.000.000,-
 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Rp. 250.000.000,-
- 6) Program Penyuluhan Pertanian Rp. 4.309.710.250,-
 - a. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Rp. 3.959.710.250,-
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
Rp. 350.000.000,-

B. Program Kegiatan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Dekonsentrasi Ditjenbun)
Rp. 248.100.000,-
 - a. Penguatan Perlindungan Perkebunan Rp. 248.100.000,-
2. Program Dukungan Manajemen (Dekonsentrasi Ditjenbun)
Rp. 835.298.000,-
 - a. Layanan Manajemen Satker Daerah Rp. 835.298.000,-
3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Tugas Pembantuan Ditjenbun) Rp. 5.591.908.000,-
 - a. Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah Rp. 3.793.155.000,-
 - b. Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Rp. 1.331.060.000,-
 - c. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Rp. 467.693.000,-
4. Program Dukungan Manajemen (Tugas Pembantuan Ditjenbun)
Rp. 920.736.000,-
 - a. Layanan Manajemen Satker Daerah Rp. 920.736.000,-

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 merupakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 diharapkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah di tetapkan pada tahun 2022 agar dapat dicapai sepenuhnya oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Dalam rangka meningkatkan kinerja di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam upaya mencapai sasaran target antara lain adalah :

1. Meningkatkan koordinasi antara lintas sektor dan lintas program termasuk dengan Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan advokasi kepada legislatif, eksekutif maupun stakeholder lainnya dalam hal anggaran dan program bidang perkebunan khususnya pada belanja langsung SKPD.
3. Meningkatkan kapasitas SDM bidang perkebunan baik di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government*

yang melibatkan seluruh *Stakeholder*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG
Jl. Basuki Rachmat No. 8A Telp. 487865, 487866 Fax. 487865
BANDAR LAMPUNG 35229

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB II RENCANA STRATEGIS	7
1.1 Rencana Strategis Tahun 2019 -2024	7
1.2 Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu	10
1.3 Rencana Kinerja Tahun 2020	11
BAB IV PENUTUP	14

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan **RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022** ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sekaligus dalam rangka terwujudnya aparatur yang bersih, bertanggungjawab dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan bahan-bahan mulai dari tahap perencanaan sampai selesainya penyusunan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja kelembagaan dan aparatur pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Februari 2022

KEPALA DINAS



Ir. YULIASTUTI, MTA

Pembina Tk I/ IVb

NIP. 19670711 199203 2 005

**MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

NO	TUJUAN				SASARAN STRATEGIS				PROGRAM				KEGIATAN				PAGU ANGGARAN									
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	1 Peningkatan Pertumbuhan PDRB Perkebunan (%)	(%)	2	1 Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	1 Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	666.897	Meningkatnya Pelayanan	1 Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	100	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perkebunan (16 dokumen)	dok	16	229.274.999,92								
									Meningkatnya Administrasi Keuangan Pemda				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2 Tersedianya pelayanan administrasi keuangan (12 bulan)	bulan	12	14.631.396.988,08				
									Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3 Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian (12 bulan)	bulan	12	109.237.000				
									Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah						4 Tersedianya pelayanan administrasi umum (12 bulan)	bulan	12	863.453.000				
									Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5 Tersedianya jasa penunjang Dinas Perkebunan (12 bulan)	bulan	12	1.489.052.505				
									Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6 Pemeliharaan barang aset Dinas Perkebunan (12 bulan)	bulan	12	693.342.000				
									Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						Persen	5	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	7 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	7 Jumlah lokasi pengawasan sarana pertanian (15 Kab/ Kota)	kab/ kota	15	75.000.000
									Meningkatnya Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman				8 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman								8 Jumlah sertifikasi benih (60 sertifikat)		sertifikat			
									Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian						Persen	3	Terlaksananya Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	9 Penataan Prasarana Pertanian	9 Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (3%)	persen	3	6.568.000.000

